

OUTLOOK 2015
SISTEM RESI GUDANG DAN PASAR LELANG KOMODITAS

A. SISTEM RESI GUDANG

I. LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN DAN HASIL

1. Melakukan Pembangunan Gudang SRG

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, Kemendag telah membangun gudang yang memenuhi ketentuan untuk menjadi Gudang SRG, baik menggunakan Dana Stimulus Fiskal, APBN-P dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 98 Gudang SRG. Untuk tahun 2014, pembangunan Gudang SRG yang dialokasikan dari DAK adalah 19 Gudang atau bertambah sebanyak 2 Gudang dari tahun sebelumnya, sehingga jumlah gudang yang dibangun adalah 117 gudang. Berikut disampaikan rincian Gudang SRG yang dibangun tahun 2009 - 2014:

JUMLAH PEMBANGUNAN GUDANG
2009 – 2014

Tahun	Gudang Dibangun	Asal Pendanaan
2009	41	Stimulus Fiskal
2010	11	APBN-P
2011	15	DAK
2012	14	DAK
2013	17	DAK
2014*)	19	DAK
Total	117	

Sumber: Bappebti (diolah).

*) dalam proses pembangunan

2. Pemberian Persetujuan Gudang SRG

Gudang yang telah dibangun pemerintah tidak serta merta dapat menjadi gudang SRG. Diperlukan kesiapan tidak hanya dari sarana prasarana, melainkan juga dari kesiapan kelembagaan di daerah, seperti Pengelola Gudang dan Lembaga Penilaian Kesesuaian Mutu Barang. Oleh karena itu, Kemendag terus melakukan upaya penyiapan pelaksanaan SRG di daerah melalui koordinasi dengan Pemda lokasi gudang yang telah dibangun.

Pada tahun 2014, telah diberikan persetujuan untuk 14 Gudang sebagai Gudang SRG yang dikelola oleh KUD Tuntung Pandang, PT Pos Indonesia, PT Pertani, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Bhanda Ghara Reksa, dan KSU Annisa dalam rangka mengakomodir keinginan petani/Poktan/Gapoktan/Koperasi untuk memanfaatkan SRG baik sebagai sarana tunda jual maupun pembiayaan.

Hasil dari kegiatan ini adalah penambahan 14 gudang SRG di Kabupaten Barito Kuala (Kalimantan Selatan), Tasikmalaya dan Subang (Jawa Barat), Bone (Sulawesi Selatan), Pasar Induk Cipinang (DKI Jakarta), Aceh Tengah (Aceh), Blora (Jawa Tengah), Jember (Jawa Timur), Lampung Selatan dan Tanggamus (Lampung). Selama tahun 2014 telah terbit 605 Resi

Gudang untuk Gabah, Beras, Jagung dan Kopi dengan volume 21.649,27 ton atau senilai Rp. 116,51 milyar di keseluruhan Gudang SRG. Sejak tahun 2009 sampai dengan 2014, jumlah gudang yang telah mengimplementasikan SRG sebanyak 92 gudang yang tersebar di 65 Kabupaten pada 16 Provinsi di Indonesia, yaitu:

**JUMLAH GUDANG YANG MENGIMPLEMENTASIKAN SRG
TAHUN 2009 – 2014**

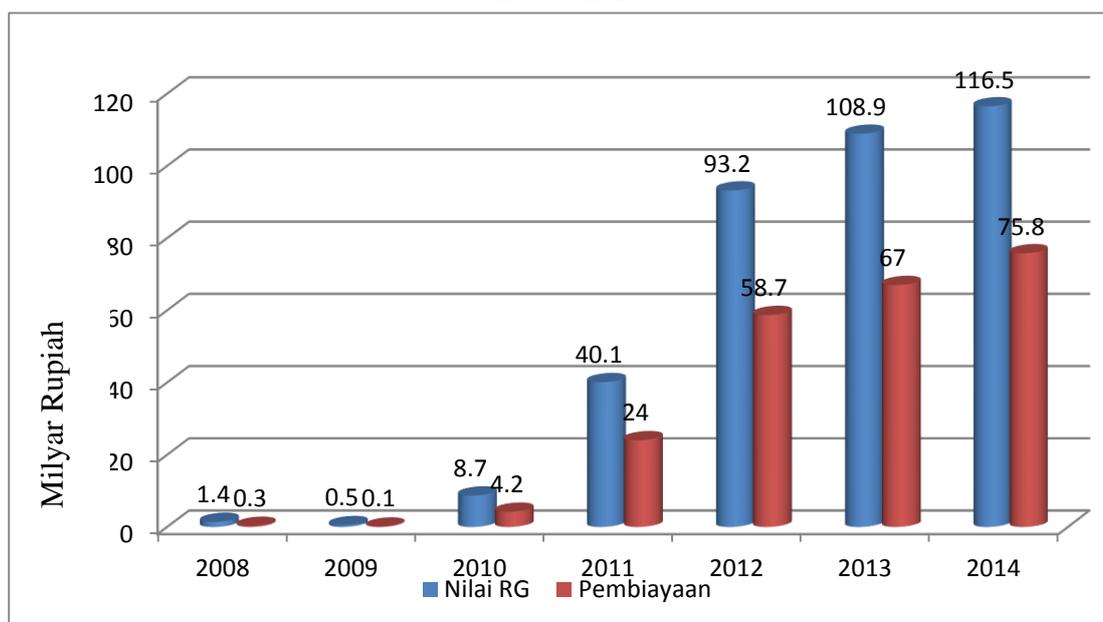
No	Propinsi Kabupaten /Kota	Jumlah Gudang	Keterangan
1	Aceh	5	Gabah, Beras dan Kopi
2	Sumatera Utara	3	Jagung
3	Sumatera Barat	1	Gabah, Beras dan Jagung
4	Sumatera Selatan	1	Gabah dan Beras
5	Lampung	3	Gabah dan Beras
6	Banten	2	Gabah dan Beras
7	DKI Jakarta	2	Gabah dan Beras
8	Jawa Barat	14	Gabah dan Beras
9	Jawa Tengah	16	Gabah dan Beras
10	D.I. Yogyakarta	1	Gabah dan Beras
11	Jawa Timur	24	Gabah, Beras dan Jagung
12	Bali	1	Gabah, Beras dan Jagung
13	Nusa Tenggara Barat	5	Gabah, Beras dan Jagung
14	Kalimantan Selatan	1	Gabah dan Beras
15	Sulawesi Barat	3	Gabah dan Beras
16	Sulawesi Selatan	10	Gabah, Beras, Jagung dan Rumput Laut
Total		92	

Sumber: Bappebti (diolah)

3. Penerbitan dan Pembiayaan Resi Gudang

Selama periode 2008 – 2014 telah diterbitkan sebanyak 1.873 Resi Gudang dengan volume barang sebanyak 72.508,15 ton yang terdiri dari 62.616,80 ton Gabah, 4.628,15 ton Jagung, 5.417,72 ton Beras, 25,49 ton Kopi dan 420,00 ton Rumput Laut. Total nilai resi gudang mencapai Rp 369,38 milyar. Dari jumlah Resi Gudang tersebut telah diagunkan sebanyak 1.584 Resi Gudang dengan nilai mencapai Rp 230,16 milyar.

**GRAFIK PERTUMBUHAN RESI GUDANG
2008 – 2014**



Sumber: Bappebti (diolah)

Sejak tahun 2010, nilai transaksi SRG selalu menunjukkan peningkatan dan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 362% dari tahun 2010. Demikian pula nilai pembiayaan pada periode yang sama juga mengalami peningkatan tertinggi yaitu sebesar 470,4%.

**PERTUMBUHAN RESI GUDANG
TAHUN 2013-2014**

TAHUN	PENERBITAN					
	Resi Gudang		Komoditi			
	Jumlah	% *)	Volume (ton)	% *)	Nilai Barang	% *)
2013	532		20.796,23		Rp 108.948.556.100	
2014	605	5%	21.649,27	8%	Rp 116.514.391.200	9%

TAHUN	PEMBIAYAAN				
	Jumlah RG	% *)	Nilai	% *)	Lembaga Keuangan
2013	446		Rp 66.993.206.000		BRI, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank BJB,
2014	559	14%	Rp 75.795.102.000	12%	BRI, Bank Jatim, Bank BJB, Bank Kalsel,

*) Prosentase pertumbuhan pada bulan berjalan tahun sebelumnya

Di tahun 2014 sendiri, Resi Gudang yang diterbitkan mencapai 605 Resi dengan volume barang sebesar 21.649,27 ton dan nilai transaksi sebesar Rp 116,5 milyar. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, pertumbuhan Resi Gudang menunjukkan pertumbuhan yang positif. Jumlah Resi Gudang yang diterbitkan tumbuh sebesar 5% dengan volume barang tumbuh sebesar 8%. Begitu pula nilai transaksi SRG meningkat sebesar 9% dari tahun sebelumnya. Demikian pula pada nilai pembiayaan di tahun 2014 juga menunjukkan peningkatan sebesar 12% dari tahun sebelumnya.

**PERKEMBANGAN TRANSAKSI SRG MENURUT KOMODITI
2008 – 2014**

No	Komoditi	Penerbitan			Diagunkan	
		Jumlah Resi Gudang	Volume Komoditi (Ton)	Nilai Barang (Rp)	Jumlah Resi Gudang	Nilai (Rp)
1	Gabah	1.677	62.016,80	310.387.194.500	1.434	195.438.355.350
2	Beras	103	5.417,72	39.370.229.000	89	24.396.655.300
3	Jagung	66	4.628,15	15.034.473.140	44	9.082.258.300
4	Kopi	15	25,49	1.111.274.187	10	150.801.063
5	Rumput Laut	12	420,00	3.474.000.000	7	1.090.600.000
Jumlah		1.873	72.508,15	369.377.170.827	1.584	230.158.670.013

Sumber: Bappebti (diolah)

Dari 10 komoditi dalam skema SRG, telah diterbitkan Resi Gudang untuk 5 komoditi yaitu Gabah, Jagung, Beras, Kopi, dan Rumput Laut. Jumlah Resi Gudang yang diterbitkan paling banyak kumulatif dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 adalah komoditi Gabah (89,7%), Beras (5,3%), Jagung (3,5%), Kopi (0,8%), dan Rumput Laut (0,6%). Sedangkan untuk nilai transaksi Resi Gudang tertinggi adalah Gabah (84,2%), Beras (10,5%), Jagung (4,1%), Rumput Laut (0,9%), dan Kopi (0,3%).

**TRANSAKSI SRG MENURUT KOMODITI
2013 – 2014**

Komoditi	2013			
	Jumlah Resi	Volume (ton)	Nilai (Rp)	Pembiayaan (Rp)
Gabah	474	17.693,44	91.405.668.300	57.019.332.000
Beras	14	1.085,20	8.026.490.000	5.615.525.000
Jagung	31	1.582,59	5.397.397.800	3.267.749.000
Kopi	1	15,00	645.000.000	-
Rumput Laut	12	420,00	3.474.000.000	1.090.600.000
TOTAL	532	20.796,229	108.948.556.100	66.993.206.000

Komoditi	2014			
	Jumlah Resi	Volume (ton)	Nilai (Rp)	Pembiayaan (Rp)
Gabah	563	18.653,35	102.482.284.200	67.405.714.000
Beras	28	797,75	6.276.600.000	3.812.888.000
Jagung	13	2.193,07	7.551.507.000	4.576.500.000
Kopi	1	5,10	204.000.000	-
Rumput Laut	-	-	-	-
TOTAL	605	21.649,265	116.514.391.200	75.795.102.000

Untuk tahun 2014 sendiri, jumlah Resi Gudang yang diterbitkan paling banyak adalah komoditi Gabah (93,1%), Beras (4,6%), Jagung (2,1%), dan Kopi (0,2%). Sedangkan untuk nilai transaksi Resi Gudang tertinggi adalah Gabah (88%), Jagung (5,4%), Beras (6,5%), dan Kopi (0,2%). Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi pada tahun 2013, dimana komoditi Gabah masih mendominasi baik dalam jumlah Resi Gudang yang diterbitkan (89,1%) maupun nilai Resi Gudang-nya (83,9%). Akan tetapi di tahun 2013 masih terdapat penerbitan resi Rumput Laut, sedangkan di tahun 2014 tidak ada sama sekali.

4. Penerapan konsep SRG integratif (hulu-hilir)

Kegiatan ini dilakukan melalui pemberian persetujuan Gudang SRG untuk Gudang milik PT Food Station Tjipinang Jaya di Pasar Induk Beras Cipinang dalam rangka mengintegrasikan pelaksanaan SRG dari wilayah sentra produksi (gabah) ke wilayah pemasaran (beras).

Selama tahun 2014 telah diterbitkan 9 (sembilan) Resi Gudang untuk komoditas beras milik Gapoktan Margo Lestari, Kab. Ngawi Jawa Timur, dengan total volume 273 ton beras, senilai Rp. 2,17 milyar dan memperoleh pembiayaan melalui dana PKBL PT Kliring Berjangka Indonesia, dengan nilai pembiayaan Rp. 1,50 milyar (70%), dan bunga pinjaman sebesar 6 % per-tahun.

Dalam rangka menjaga kesinambungan implementasi SRG tersebut maka perlu pelaksanaan sosialisasi / Bimbingan Teknis SRG kepada para pedagang beras yang berada di Pasar Induk Beras Cipinang dan melakukan pendekatan kepada BRI dan BJB untuk mendukung pembiayaan dengan skema SRG baik subsidi maupun non-subsidi.

5. Percepatan Implementasi SRG untuk komoditi Rotan

Dalam rangka mempercepat implementasi rotan sebagai komoditi SRG maka telah dilakukan pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) untuk komoditi Rotan dengan hasil berupa kesepakatan penetapan lokasi *pilot project* SRG komoditi Rotan, yaitu untuk sentra hulu di Bambi Pidie sebagai sentra produksi utama rotan dan untuk sentra hilir di daerah Cirebon sebagai sentra industri Rotan.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut maka telah dilakukan sosialisasi SRG untuk para pelaku usaha rotan di Cirebon bekerjasama dengan Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI), pihak perbankan (BJB), serta Dinas terkait yang bertujuan memberikan informasi kepada para pelaku usaha mengenai implementasi SRG dalam mendorong industri rotan.

Melalui sosialisasi ini maka diperoleh kesepakatan untuk memanfaatkan salah satu gudang swasta di Cirebon untuk mengimplementasikan SRG khususnya komoditi Rotan bekerjasama dengan AMKRI, Balai Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan, Bank BJB Cirebon dan PT KBI. Menindaklanjuti hal tersebut, maka Bappebti akan mempersiapkan infrastruktur kelembagaan SRG, khususnya komoditi Rotan di Cirebon.

6. Pengembangan SRG Rumput Laut

Pengembangan SRG Rumput Laut dilaksanakan melalui pertemuan kelompok kerja SRG dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Koperasi dan UKM, Perindustrian, Kementerian Desa PDT, Bank Indonesia, Bank BRI, dan para Pengelola Gudang SRG serta pelaku usaha terkait.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah :

- a. Tercapainya sinergi dengan anggota kelompok kerja SRG untuk memanfaatkan seluruh sumber daya (fisik, tenaga kerja, sistem informasi, modal, dan akses pasar) yang dimiliki oleh K/L anggota Pokja,
- b. Kesepakatan pemanfaatan gudang dan tenaga penyuluh lapangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang disinergikan dengan bantuan sarana pendukung gudang (truk, alat pres dan sarana pengering rumput laut) dari Kementerian Koperasi & UKM dan Bank Indonesia, dan
- c. Pemanfaatan informasi harga komoditas pada tingkat petani/produsen di kabupaten yang terdapat Gudang SRG sebagai referensi harga dalam penentuan nilai Resi Gudang rumput laut.
- d. Pengembangan SRG Rumput Laut dengan mendorong perluasan pasar Rumput Laut baik di dalam negeri melalui Pasar Lelang Komoditas maupun luar negeri dengan mengoptimalkan fungsi Atdag dan ITPC di negara-negara mitra dagang.

7. Sosialisasi Kebijakan Sistem Resi Gudang

Selama tahun 2014, Bappebti telah melaksanakan 9 (sembilan) kali kegiatan Sosialisasi Kebijakan di bidang SRG dengan menargetkan pelaku usaha SRG dan civitas akademisi sebagai peserta kegiatan.

SOSIALISASI KEBIJAKAN SISTEM RESI GUDANG TAHUN 2014

No	Tempat Pelaksanaan	Tanggal	Jumlah Peserta
1	Bali (Univ. Udayana)	25 Februari 2014	100
2	Lampung (Hotel Anugerah)	19 Maret 2014	100
3	Kepahiang (Gudang SRG)	23 Juni 2014	100
4	Bandung (Univ. Padjadjaran)	26 Juni 2014	100
5	Jakarta (Workshop Aryaduta)	14 Juli 2014	100
6	Langkat (Gudang SRG)	2 September 2014	100
7	Majalengka (Univ. Majalengka)	11 November 2014	100
8	Yogyakarta (Univ. Gadjah Mada)	27 November 2014	100
9	Cirebon (Rattan One)	11 Desember 2014	100

8. Peraturan-peraturan di Bidang Sistem Resi Gudang

Sepanjang tahun 2014, Bappebti telah menerbitkan 4 (empat) peraturan di bidang SRG guna meningkatkan salah satu fungsi Bappebti sebagai pengatur atau regulator SRG. Peraturan-peraturan tersebut yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang;
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/9/2014 tentang Tata Cara Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang;
- c. Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 Tentang Pedoman Teknis Penerbitan Resi Gudang;
- d. Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 18/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014 Tentang Spesifikasi Teknis Pengamanan Blanko Resi Gudang.

II. KENDALA

Dalam melaksanakan implementasi dan pengembangan SRG, Bappebti menemui beberapa kendala, antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman dan komitmen masyarakat, pelaku usaha (petani, pedagang, pabrikan), dan dunia perbankan terhadap mekanisme Sistem Resi Gudang;
2. Belum optimalnya pemanfaatan Gudang SRG yang sudah dibangun;
3. Keterbatasan infrastruktur gudang di daerah yang memenuhi persyaratan;
4. Kualitas hasil panen belum sepenuhnya memenuhi standard mutu yang dipersyaratkan;
5. Keterbatasan referensi Harga Komoditas;
6. Belum optimalnya sinergi kebijakan antar instansi terkait, pemda dan sektor swasta serta pelaku SRG;
7. Kurangnya komitmen pemerintah daerah terhadap keberlanjutan kebijakan pengembangan SRG setelah pembangunan gudang selesai serta cepatnya perputaran/mutasi pejabat daerah yang membidangi perdagangan;
8. Terbatasnya Pengelola Gudang di daerah yang memiliki permodalan cukup serta mampu melakukan pengelolaan dan pemasaran komoditas (integrasi bisnis);
9. Kurangnya SDM tenaga Badan Pengawas SRG.
10. Beberapa lokasi gudang SRG jauh dari lembaga Penguji Mutu Komoditi.

III. LANGKAH KE DEPAN

Langkah yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan SRG pada tahun 2015 adalah :

1. Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang yang kredibel dan handal melalui Peraturan Pemerintah. Dengan ditetapkannya Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang yang berfungsi sebagai penjamin terhadap terjadinya kegagalan

pengelolaan barang oleh Pengelola Gudang, diharapkan kepercayaan pelaku usaha dan perbankan terhadap integritas SRG semakin meningkat.

2. Strategi jalur ganda dimana fokus pengembangan SRG untuk tunda jual dan akses pembiayaan yang meliputi:
 - a. Peningkatan daya saing komoditas pangan:
 - Pemberdayaan pelaku kecil seperti petani, kelompok tani, gapoktan dan koperasi dalam hal pemasaran dan distribusi komoditas gabah, beras dan jagung;
 - Peningkatan literasi SRG melalui Sosialisasi dan Bimbingan Teknis;
 - Insentif suku bunga (skema Subsidi SRG) dan percepatan pencairan kredit;
 - Penguatan kelembagaan kelompok tani dan koperasi bekerjasama dengan instansi terkait.
 - b. Peningkatan nilai tambah dan daya saing ekspor:
 - Penyediaan akses pembiayaan bagi pabrikan, prosesor, dan pedagang besar;
 - Perluasan komoditas perkebunan, kelautan dan pertambangan seperti kopi, kakao, rumput laut dan timah;
 - Perluasan pembiayaan bagi pabrikan, prosesor, maupun pedagang besar dengan skema bunga komersial dari bank pemerintah dan swasta.
3. Dalam rangka mendukung strategi pencapaian jalur ganda, diperlukan:
 - a. Optimalisasi gudang *existing* sebagai Gudang SRG, dengan memanfaatkan gudang BUMN, Perpadi, Koperasi maupun pelaku usaha di daerah yang memenuhi ketentuan SNI 7331:2007;
 - b. Pengembangan model bisnis SRG integratif dari hulu (pra-Resi Gudang) hingga hilir (termasuk jaringan logistik dan pemasarannya) melalui pemanfaatan pasar lelang *online* dan bursa berjangka komoditi;
 - c. Pengaturan mengenai Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) untuk mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan pengujian mutu;
4. Melaksanakan pelatihan di bidang SRG kepada pelaku usaha maupun SDM Badan Pengawas.
5. Pembentukan Kelompok Kerja SRG, dan optimalisasi Tim Pokja yang dimiliki K/L terkait di pusat maupun daerah.
6. Pengalihan prioritas anggaran APBN (DAK) dari pembangunan gudang ke dukungan fasilitas yang dapat memberikan nilai tambah komoditas dan optimalisasi bisnis SRG, seperti *Rice Milling Unit* dan truk.
7. Menghimpun dan mengolah harga komoditas dari Pasar Lelang, Pasar Fisik dan sumber lainnya sebagai referensi harga bagi stakeholder SRG.
8. Membuat Pengaturan di bidang Sistem Resi Gudang, yaitu :
 - a. RPP tentang Persyaratan dan Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang;

- b. Peraturan Kepala Bappebti tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 04/Bappebti/PER-SRG/7/2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Sistem Resi Gudang.
9. Peningkatan peran aktif berbagai stakeholders yang terkait dalam pengembangan Sistem Resi Gudang, seperti :
- a. Kementerian/Lembaga
 - Penyusunan Kebijakan Nasional untuk Mempercepat Pengembangan SRG (Kemenko, Kemendagri)
 - Pengoordinasian Antar Sektor Pertanian, Keuangan, Perbankan dan Sektor Terkait Lainnya Untuk Pengembangan SRG (Kemenko)
 - Sinergi kebijakan dan program kegiatan yang terdapat di K/L terkait Sistem Resi Gudang, seperti Subsidi Kredit Program, Lumbung Pangan Desa, Persyaratan Impor, Program Pelatihan SDM, Penyuluh Pertanian, dsb (Kemenkeu, Bank Indonesia, Kemenkop UKM, Kemendag, Kementan, dsb) ;
 - Pemanfaatan gudang-gudang komoditas yang dibangun pemerintah (Rumput Laut, Garam, Gabah, Beras) untuk dapat bersinergi dengan skema SRG (KKP);
 - Koordinasi Pengembangan Informasi Harga Komoditas (Kominfo/Kementan/ Kemendag, dsb)
 - Penguatan Koperasi dan UKM sebagai penyimpan atau Pengelola Gudang SRG (Kemenkop UKM);
 - Peningkatan pola budidaya pertanian guna meningkatkan mutu komoditas hasil pertanian (Kementan);
 - b. Lembaga dalam SRG (Pengelola Gudang, LPK, Pusreg)
 - Meningkatkan pemanfaatan Sistem Resi Gudang dan menjadi *standby buyer* untuk komoditi yang disimpan di gudangnya;
 - Ikut melakukan sosialisasi pemanfaatan SRG bagi petani maupun para pelaku usaha;
 - Mendorong petani, kelompok tani, maupun para pelaku usaha untuk memanfaatkan SRG;
 - c. Akademisi
 - Pengembangan program KKN tematik yang memasukan nilai-nilai pemberdayaan petani/masyarakat desa melalui SRG;
 - Sinergi Program Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) dengan Program Sistem Resi Gudang;
 - Penelitian pengembangan SRG
 - Optimalisasi Laboratorium sebagai Lembaga Penguji Mutu Komoditas dalam SRG;
 - d. BUMN dan Swasta
 - Mengintegrasikan praktek bisnis yang selama ini dilaksanakan dengan SRG;
 - Optimalisasi PKBL yang dimiliki BUMN dalam mendorong pelaksanaan SRG;
 - Melakukan sosialisasi SRG bersama dengan Bappebti dan Kementerian/Lembaga lain yang terkait;

e. Pemda

- Dukungan APBD dalam mendorong percepatan pelaksanaan SRG (DPRD dan Bupati);
- Pengorganisasian antar sektor pertanian, perdagangan, ketahanan pangan, keuangan, pembangunan daerah melalui pembentukan Tim Terpadu SRG (Sekretaris Daerah);
- Pemfasilitasian pengembangan Pasar Komoditas di daerah (Dinas Perdagangan);
- Penyediaan/pembiayaan sarana prasarana serta peralatan *surveillance* penunjang SRG, seperti palet, mesin penggilingan, sarana angkutan, CCTV (Perbankan);
- Penyelenggaraan sosialisasi SRG (seluruh SKPD terkait);

B. PASAR LELANG KOMODITAS

I. LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN DAN HASIL

1. Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas

Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas yang dilakukan selama periode 2004 sampai dengan tahun 2009 hanya dilakukan oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan. Selanjutnya, sejak tahun 2009 mulai terdapat Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang berasal dari pihak swasta.

Pada tahun 2014 terdapat 14 Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang dibiayai oleh APBN dan APBD yaitu Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan DKI Jakarta. Untuk penyelenggaraan Pasar Lelang oleh pihak swasta dilakukan oleh PT iPASAR Indonesia dan Pasar Fisik CPO Bursa Berjangka Jakarta.

PERKEMBANGAN PENYELENGGARA PASAR LELANG KOMODITAS 2003 – 2014

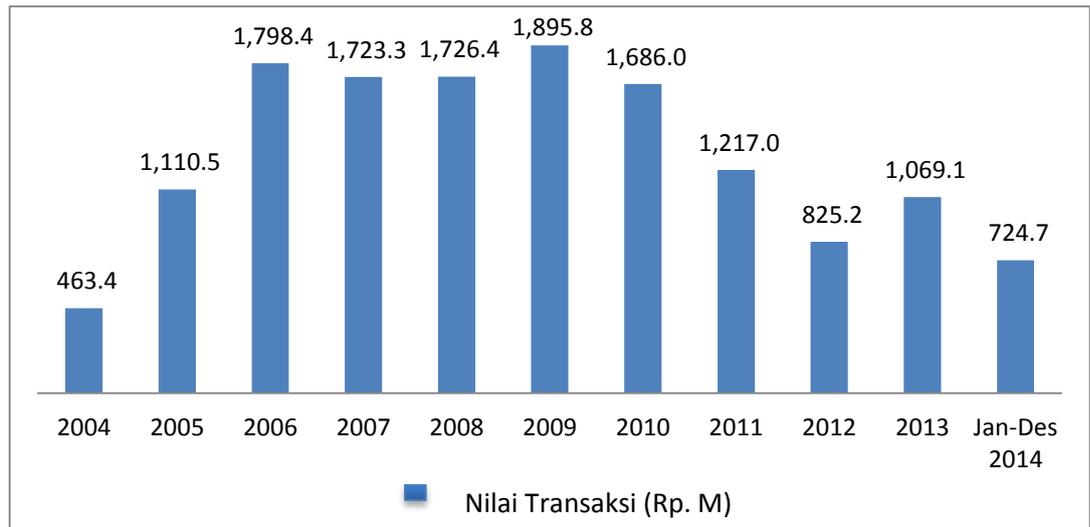
No	Tahun	Dinas	Swasta
1	2003	3	-
2	2004	9	-
3	2005	14	-
4	2006	19	-
5	2007	19	-
6	2008	19	-
7	2009	21	1
8	2010	21	2
9	2011	19	2
10	2012	16	2
11	2013	14	2
12	2014	14	2

2. Pengawasan Transaksi Pasar Lelang Komoditas

Pengawasan transaksi di Pasar Lelang Komoditas dilakukan baik secara *on the spot* maupun berdasarkan data transaksi yang dikirim kepada Bappebti. Pengawasan dilakukan secara berkala dengan pelaporan yang dilakukan setiap bulan kepada Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, dan swasta.

Pada tahun 2014, nilai transaksi Pasar Lelang Komoditas tercatat sebesar Rp. 724.711.184.000 atau mengalami penurunan sekitar 32% dari tahun sebelumnya. Selama tahun 2004 sampai 2014, pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas telah membukukan nilai transaksi sekitar Rp 14 Triliun dengan perincian sebagai berikut:

PERKEMBANGAN TRANSAKSI PASAR LELANG KOMODITAS 2004 – 2014



Sumber : Bappebti (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai transaksi Pasar Lelang Komoditas mengalami kenaikan transaksi tertinggi pada tahun 2005 yaitu 139,66% dibandingkan tahun 2004. Kenaikan transaksi tersebut disebabkan oleh bertambahnya jumlah Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas.

Komoditi yang ditransaksikan di Pasar Lelang Komoditas pada umumnya adalah komoditi agro. Pada tahun 2014, telah dilakukan lelang 175 jenis komoditi dengan nilai transaksi 10 komoditi terbesar adalah sebagai berikut:

10 KOMODITI DENGAN NILAI TRANSAKSI TERBESAR TAHUN 2014

No	Komoditi	Nilai Transaksi (Rp)
1	Beras	246.365.174.000
2	Jagung	81.605.975.000
3	Sapi	61.512.000.000
4	Kakao	27.167.960.000
5	Ikan Nila	24.082.000.000
6	Kentang	21.346.400.000
7	Jahe	19.446.100.000
8	Cabe	16.682.600.000
9	Gula Pasir	14.137.380.000
10	Cengkeh	13.726.700.000
11	Lainnya	198.638.895.000
TOTAL		724.711.184.000

Sumber : Bappebti (diolah)

Dari keseluruhan komoditi yang dilelang tersebut, Beras merupakan komoditi yang mempunyai nilai transaksi terbesar dengan *market share* sebesar 34,0%, diikuti oleh

Jagung (11,3%), Sapi, (8,5%), Kakao (3,7%), Ikan Nila (3,3%), Kentang (2,9%), Jahe (2,7%), Cabe (2,3%), Gula Pasir (2,0%), dan Cengkeh (1,9%). Hal ini tidak jauh berbeda dengan kondisi pada tahun 2013 dimana tiga komoditas dengan *market share* terbesar adalah Beras (27,8%), Jagung (13,7%), dan Sapi (8,2%).

3. Revitalisasi Pasar Lelang

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Pasar Lelang Komoditas, strategi yang dilakukan adalah Revitalisasi Pasar Lelang melalui penguatan kelembagaan, sinergi antara Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang serta pengawasan dan penegakan hukum. Tujuan Revitalisasi ini adalah membentuk penyelenggara Pasar Lelang yang mandiri dan professional dalam arti tidak bergantung pada dana APBN/APBD dan fokus pada pengembangan Pasar Lelang. Sebagai percontohan revitalisasi Pasar Lelang, pada tahun 2014 telah terpilih 5 daerah dari 13 penyelenggara Pasar Lelang, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Selatan dimana dari kelima daerah tersebut, seluruhnya telah diberikan persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang kepada pihak swasta.

Saat ini telah diberikan persetujuan kepada 5 (lima) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang berasal dari pihak swasta yaitu Koperasi Pasar Lelang Agro Jawa Tengah, Koperasi Pegawai Negeri Praja Bali, Koperasi Pasar Lelang Jawa Barat dan PT Puspa Agro di Sidoarjo, dan Koperasi Pusat Komoditi dan Pasar Lelang Agro (PUSKOMPAS) Makassar.

Melalui persetujuan ini, maka mulai tahun 2015 penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas yang selama ini dilakukan oleh Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan akan dialihkan kepada Koperasi/lembaga yang telah diberikan persetujuan oleh Bappebti tersebut. Kedepan, Dinas yang membidangi perdagangan akan berperan sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan Pasar Lelang di bawah koordinasi Bappebti.

4. Sosialisasi Kebijakan Pasar Lelang Komoditas

Di sepanjang tahun 2014, Bappebti telah melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan Sosialisasi Kebijakan di bidang Pasar Lelang Komoditas di Brebes pada tanggal 16 Juni 2014 yang diikuti oleh 100 orang peserta.

5. Peraturan di Bidang Pasar Lelang Komoditas

Pada tahun 2014, Bappebti telah menerbitkan 1 (satu) peraturan di bidang PLK guna meningkatkan salah satu fungsi Bappebti sebagai pengatur atau regulator PLK, yaitu Peraturan Kepala Bappebti Nomor : 03/BAPPEBTI/PER-PL/01/2014 tentang Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward).

II. KENDALA

Dalam melaksanakan implementasi dan pengembangan Pasar Lelang Komoditas, Bappebti menemui beberapa kendala, antara lain :

1. Kelembagaan penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas belum terbentuk sempurna;

2. Masih terdapatnya gagal serah / gagal bayar;
3. Sulitnya pemantauan realisasi transaksi Pasar Lelang Komoditas karena belum diterapkan sistem penjaminan transaksi;
4. Minat pelaku usaha terhadap Pasar Lelang Komoditas masih rendah.
5. Ketergantungan APBN/APBD untuk biaya operasional;
6. Ketergantungan biaya untuk mendatangkan peserta/pembeli;
7. Belum adanya Sistem Informasi yang terintegrasi;
8. Standar mutu & jenis komoditas yang belum diterapkan;

III. LANGKAH KE DEPAN

Langkah yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan Pasar Lelang Komoditas pada tahun 2015 adalah :

1. Penyempurnaan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 650/MPP/Kep/10/2004 melalui Peraturan Presiden sebagaimana amanat UU No 7/2014;
2. Melakukan Revitalisasi Pasar Lelang meliputi kelembagaan dan penjaminan transaksi pada seluruh penyelenggara Pasar Lelang Forward;
3. Mengoptimalkan sinergitas Pasar Lelang dengan Sistem Resi Gudang, antara lain melalui pengembangan Pasar Lelang *Online* yang dapat memasarkan seluruh komoditas yang disimpan dalam gudang SRG;
4. Peningkatan literasi Pasar Lelang melalui Sosialisasi dan diseminasi informasi;
5. Melakukan pengembangan Sistem Informasi Pasar Lelang yang dapat mengintegrasikan data anggota, transaksi dan informasi pasar dari seluruh penyelenggara Pasar Lelang secara nasional;
6. Mendorong Pemda untuk menerbitkan Perda yang mengatur perdagangan komoditas melalui Pasar Lelang.
7. Membuat rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas.

C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BAPPEBTI DI BIDANG SRG DAN PLK

Di tahun 2014, kinerja Bappebti sebagai badan yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas dapat dinyatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari 8 (delapan) indikator sasaran, dimana 6 (enam) diantaranya telah mencapai target dan bahkan 4 (empat) melebihi target capaian.

MATRIK CAPAIAN INDIKATOR BAPPEBTI DI BIDANG SRG DAN PLK TAHUN 2014

No	Indikator	Target	Capaian Jumlah	Capaian %
1	Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha SRG dan PL setelah dokumen lengkap.	20 hari	20 hari	100%
2	Jumlah gudang yang memanfaatkan SRG.	90 gudang	92 gudang	102,22%
3	Jumlah peserta pelatihan teknis penyelenggara SRG dan PLK.	150 orang	245 orang	163,33%
4	Presentase pengawasan SRG dan PLK.	100%	101.32%	101,32%
5	Jumlah nilai Resi Gudang.	120M	116,5M	97%
6	Jumlah daerah potensial dalam pelaksanaan SRG.	10 daerah	26 daerah	260%
7	Jumlah transaksi di PLK.	1T	724,71M	72,47%
8	Jumlah percontohan revitalisasi penyelenggara PL di daerah.	5 daerah	5 daerah	100%